

**PERANAN BATALYON 306 DIVISI SILIWANGI DALAM PENUMPASAN
GERAKAN DI/TII DI GARUT TAHUN 1950-1962**

JURNAL

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta Untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar
Sarjana Sastra**



Disusun oleh:

FAUZAN MANAANUL HAKIM

13407144029

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

PERANAN BATALYON 306 DIVISI SILIWANGI DALAM PENUMPASAN GERAKAN DI/TII DI GARUT TAHUN 1950-1962

Oleh: Fauzan Manaanal Hakim 13407144029 dan Drs. Djumarwan

Pada saat Indonesia sudah merdeka, situasi dan kondisi keamanan negara belum stabil. Adanya ancaman dari Belanda serta perbedaan pandangan politik dari para kaum elit banyak memberikan pengaruh terhadap keadaan negara. Perbedaan pandangan politik tersebut terlihat ketika berdirinya gerakan DI/TII yang memproklamasikan diri sebagai negara pada tahun 1949 di Tasikmalaya. Gerakan tersebut seringkali melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat Garut. Hal ini membuat pemerintah dengan segera memerintahkan operasi penumpasan terhadap DI/TII di Garut melalui peran Batalyon 306 Divisi Siliwangi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa gerakan DI/TII dapat diterima oleh masyarakat serta perkembangannya dan pelaksanaan operasi penumpasan DI/TII yang dilakukan oleh TNI.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis yang terdiri dari; (1). Heuristik yang bertujuan mencari dan mengumpulkan jejak-jejak peristiwa yang disebut sumber sejarah; (2). Verifikasi, merupakan suatu proses meneliti sumber sejarah dengan cara menganalisa keotentikan dan kredibilitas sumber yang dikumpulkan serta dapat dipertanggungjawabkan; (3). Interpretasi, menafsirkan makna saling berkaitan pada fakta sejarah yang diperoleh; (4). Historiografi, yaitu proses memadukan berbagai pernyataan dan fakta mengenai peristiwa dalam bentuk karya tulis sejarah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa gerakan DI/TII di Garut tidak lepas dari latar belakang kehidupan Kartosuwiryo, serta adanya Institut Suffah. Selain itu, hijrahnya Divisi Siliwangi yang meninggalkan Jawa Barat, mempengaruhi pergerakan DI/TII untuk menghasut masyarakat. Gerakan DI/TII akhirnya dapat ditumpas oleh TNI melalui Batalyon 306 Divisi Siliwangi. Penumpasan Gerakan DI/TII di Garut terbagi menjadi dua periode, yakni 1950-1958 dan 1959-1962. Batalyon 306 dalam pelaksanaan operasi periode pertama masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam membentuk pos-pos regu keamanan. Hal ini membuat operasi penumpasan dilanjutkan pada periode kedua, serta turut menyertakan peran penduduk dalam siasat Pagar Betis untuk berperan aktif menjaga kedaulatan negara. Pada periode kedua, siasat Batalyon 306 lebih matang dalam pembentukan pos-pos regu kewanaman. Sehingga gerakan DI/TII di Garut dapat diberantas dengan adanya pos-pos regu keamanan yang berisikan tentara dan penduduk setempat dalam mengisolasi wilayah aktifitas gerilya DI/TII.

Kata Kunci: Peranan Batalyon 306, Divisi Siliwangi, Penumpasan DI/TII.

Abstract

After Independent Indonesia, situation and condition of national security unstable. The threats from Netherlands and different in political views of the elite politic has influence to the country situation. The differences of political views was seen when the establishment of DI/TII movement which proclaimed itself as a state in Tasikmalaya on 1949. That group often did actions and disturb the people of Garut. The government immediately ordered for operation of the crackdown againts DI/TII in Garut through the role of Battalion 306 Siliwangi Division. The purpose of this study is finding out why the DI/TII acceptable to the citizen and its development and implementation of the crackdown operations carried out by the Indonesian National Army (TNI).

The method used in this study is a method of historical consisting of; (1). Heuristics aimed at locating and collecting traces of events called historical sources; (2). Verification is a process of researching historical sources by analyzing the authenticity and credibility of sources collected and accountable; (3). Interpretation, interpreting the interrelated meaning of historical facts obtained; (4). Historiography, which is the process of combining various statements and facts about case in the form of historical papers.

Based on the research results can be concluded that the DI/TII in Garut can not be separated from Kartosuwiryo life background, and the existence of the Suffah Institute. furthermore, the departure of Siliwangi Division leaving West Java, influenced the movement of DI/TII to incite the public. Crushing of the DI/TII movement in Garut is divided into two periods, namely 1950-1958 and 1959-1962. The Battalion 306 in the implementation of the first period of operation still many mistakes made by its members in forming posts-group security. This made the crushing operations continue for the second period, and included the role of residents in the Pagar Betis tactics an active role in safeguarding state sovereignty. In the second period, the Battalion 306 strategy was more mature in the formation of posts- group security. So the movement of DI/TII in Garut can be eradicated by the presence of security squads containing troops and local residents in isolating areas of DI/TII guerrilla activity.

Keywords: Role Battalion 306, Siliwangi Division, Crushed DI/TII

A. Pendahuluan

Lima hari setelah berlangsungnya proklamasi, pada 22 Agustus 1945, pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai wadah perjuangan. Seiring dengan ancaman yang kian meningkat, pada 5 Oktober 1945, BKR kemudian diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pasca Proklamasi kemerdekaan, Republik Indonesia fokus terhadap pengamanan wilayah negara, melalui TKR sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan.

Republik Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, langsung dihadapkan dengan adanya permasalahan-permasalahan yang serius. Situasi ini membuat Indonesia mengalami hal-hal yang sulit dalam bidang keamanan dan kesejahteraan.¹ Ancaman tersebut muncul ketika Belanda melakukan Agresi Militer yang pertama. Hal ini membuat banyak kepala daerah dan tokoh-tokoh nasional yang resah dengan adanya Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda, karena dapat mengancam keselamatan masyarakat. Pada 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi gencatan senjata pada tanggal 5 Agustus. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sepakat melakukan gencatan senjata.

Penandatanganan perjanjian *Renville* sebagai jalur diplomasi, turut memecah belah kekuatan Republik Indonesia. Hasil perjanjian tersebut merugikan Indonesia, serta wilayah Indonesia di pulau Jawa menjadi sempit. Kartosuwiryo sebagai tokoh elit dari golongan politik Islam tidak dapat menerima hasil keputusan dari perjanjian *Renville* tersebut. Hal ini menjadikan landasan ia untuk mewujudkan sebuah negara yang berpedoman terhadap hukum agama Islam, yaitu *Al-Qur'an* dan *Hadist*.²

Adanya kebijakan pemerintah mengenai reorganisasi pada tubuh TNI atau yang biasa disebut program Re-Ra (Reorganisasi dan Rekonsiliasi) sebagai upaya

¹Ulf Sandhaussen, *Road To Power: Indonesian Military Politics 1945-1967*, (Oxford: Oxford University Press 1982), a.b Hasan Besari, *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 90

²*Ibid.*, hlm 92.

merampungkan anggaran negara yang sedang membengkak pada masa Kabinet Amir Syarifuddin, membuat laskar-laskar gerilya perang kemerdekaan kecewa terhadap pemerintah.³ Hal ini memicu konflik pemberontakan dari laskar-laskar gerilya dan banyak yang bergabung dengan satuan-satuan DI/TII sebagai hasil ketidakpuasan dengan program Re-Ra.

Berdirinya DI/TII sendiri menjadi pusat perhatian pemerintah yang sedang mengalami pergolakan politik. Pemerintah menganggap bahwa gerakan DI/TII dapat memecah belah persatuan serta merupakan sebuah ancaman yang nyata terhadap kemerdekaan Indonesia. Pemerintah segera mengambil tindakan tegas dengan memerintahkan operasi militer yang tercantum pada peraturan pemerintah No. 59 tahun 1948.

Pelaksanaan operasi penumpasan DI/TII di Garut, membuat TNI memberikan perintah terhadap Divisi Siliwangi untuk segera menumpas gerakan tersebut. Batalyon 306 yang dipimpin oleh Dan-Yon Alwin Nurdin diterjunkan dalam menumpas pergerakan DI/TII di Garut.⁴ Operasi penumpasan yang dilakukan oleh Batalyon 306 Divisi Siliwangi, pada mulanya tidak begitu membuahkan hasil yang positif dalam mengembalikan keamanan negara seperti semula.⁵ Usaha-usaha TNI yang tidak membuahkan hasil dalam pelaksanaan operasi penumpasan DI/TII di Garut, membuat Kodam VI Siliwangi untuk mengumpulkan tentara-tentara yang ahli dalam bidang strategi perang. Hal ini karena Batalyon 306 masih menggunakan taktik

³M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia*, a.b, Dharmono Hardjowidjono, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981), hlm. 342.

⁴Alwin Nurdin, *Riset Tentang Batalyon Dalam Operasi Anti-Gerilya Divisi Siliwangi/Teritorium-III Jawa Barat*, (Bandung: Disjarah TNI AD, 1999), hlm. 1.

⁵Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosuwiryo (Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/DI-TII semasa Orde Lama dan Orde Baru)*, (Jakarta: Darul Falah, 1999), hlm 27.

pasif-defensif. Hasil dari berkumpulnya ahli-ahli strategi TNI ialah operasi gabungan dari berbagai divisi dan bagian keamanan negara seperti satuan Mobrig.

Operasi ini dilakukan atas dasar berhasilnya strategi yang dirancang dalam Rencana Operasi 2. 1. (R.O. 2. 1.). Dari hasil ini, pemerintah dan TNI meningkatkan pelaksanaan operasi tersebut dalam Rencana Operasi 2. 1. 2. 1 (R.O. 2. 1. 2. 1) sebagai usaha pemulihan keamanan negara.⁶ Hal ini sejalan dengan Tri Program Pemerintah kala itu, yang salah satu isinya menyatakan bahwa masalah keamanan di seluruh Indonesia tanpa terkecuali harus diselesaikan pada akhir tahun 1962.⁷

Penelitian ini merumuskan masalah yang terbagi menjadi tiga aspek, yaitu; 1). Mengapa gerakan DI/TII diterima di kalangan masyarakat; 2). Bagaimana perkembangan DI/TII di Garut; 3). Bagaimana pelaksanaan operasi penumpasan pemberontakan DI/TII di Garut 1950-1962. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan masyarakat Garut, perkembangan DI/TII di Garut dan mengetahui pelaksanaan operasi militer dalam penumpasan DI/TII di Garut.

B. Tinjauan Umum Garut Sebagai Daerah Peristiwa DI/TII

Wilayah Garut berawal setelah dibubarkannya Kabupaten Limbangan pada tahun 1811 oleh Daendels. Pembubaran tersebut dikarenakan produksi kopi dari daerah Limbangan menurun hingga bagian paling terendah. Hal ini membuat kecewa pihak Hindia-Belanda karena produksi kopi tersebut tidak dapat memenuhi target, dan membuat Kabupaten Limbangan terpecah-pecah dan masuk ke wilayah Kabupaten Bandung, Cianjur dan Sumedang.⁸

⁶Disjarah TNI AD, *Penumpasan DI/TII S.M. Kartosuwiryo di Jawa Barat*, (Bandung: Disjarah TNI AD, 1985), hlm. 128.

⁷Aan Ratmanto, *Pasukan Siliwangi: Loyalitas, Patriotisme dan Heroisme*, (Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2012), hlm. 185.

⁸Bayu Surianingrat, *Pustaka Kabupaten i Bhumi Limbangan Dong Garut*, (t.tk: t.p, 1985), hlm. 187.

Pada 16 Februari 1813, Raffles yang saat itu menjabat sebagai seorang Letnan Gubernur di Indonesia, mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan kembali Kabupaten Limbangan yang sudah terpecah. Hal ini merupakan sebuah upaya dalam mencari solusi akibat dari sulitnya menyelenggarakan pemerintahan setelah pembubaran Kabupaten Limbangan oleh Daendels. Kabupaten Limbangan yang dibentuk kembali bertujuan untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada 15 September 1813 diletakkan batu pertama untuk membangun sarana dan prasarana ibukota seperti rumah dinas, kantor, pendopo, kantor asisten-residen, masjid, penjara, dan alun-alun. Di antara pendopo dan alun-alun terdapat panggung permanen yang berfungsi sebagai tempat berpidato bupati dan pejabat-pejabat pemerintah di depan masyarakat. Setelah tempat-tempat tersebut dibangun, secara resmi Kabupaten Limbangan ibukotanya dipindahkan dari Suci ke Garut sekitar tahun 1821.⁹

Kabupaten Garut rata-rata dihuni oleh etnis Sunda yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. Pada tahun 1930 jumlah etnis Sunda di Garut mencapai 663.705 jiwa atau 97% dari jumlah keseluruhan. Suatu hal yang logis jika kehidupan masyarakat Garut sangat dipengaruhi oleh sistem sosial dan budaya Sunda. Dadang Kahmad mengemukakan bahwa etnis Sunda merupakan sebuah budaya yang religius sebagai konsekuensi nilai-nilai pandangan hidup yang didasarkan pada ajaran-ajaran agama Islam dan adat istiadat.¹⁰

Garut yang begitu kental dengan adat istiadat Sunda yang harmonis dan ramah, tidak bisa dipisahkan dari pengaruh agama Islam dalam kehidupan masyarakat. Agama dan adat Istiadat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

⁹Kunto Sofianto, *Garuet Kota Intan*, (Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2001), hlm. 11.

¹⁰Dadang Kahmad, *Agama Islam Dalam Perkembangan Budaya Sunda*, (Bandung: Pusat Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2009), hlm. 2.

Hal ini mempengaruhi dalam kegiatan politik di Garut. Dukungan dari masyarakat yang beragama Islam, membuat banyak organisasi-organisasi beraliran Islam yang berkembang dan mudah diterima dalam setiap lapisan-lapisan masyarakat. Banyak organisasi-organisasi yang berkembang di Garut pada saat itu dan salah satunya adalah Muhammadiyah.

C. Pemberontakan DI/TII di Garut

Lahirnya DI/TII tidak dapat lepas dari peran Kartosuwiryo sebagai tokoh politik Islam. Garut yang merupakan wilayah di bawah Propinsi Jawa Barat merupakan basis gerakan DI/TII yang besar karena didukung oleh penduduk setempat yang mayoritas menganut agama Islam. Organisasi-organisasi Islam yang sependapat dengan pandangan hidup Kartosuwiryo pun menjadi sokongan dalam berjalannya gerakan DI/TII.

Keinginan Kartosuwiryo dalam menerapkan konsep Islam dalam sebuah negara, ia terapkan dahulu dalam tubuh SI sebagai upaya memajukan langkah dan pergerakan politiknya. Ketika SI di bawah pimpinan Kartosuwiryo, namanya diganti dengan PSII sebagai langkah pembaharuan. Tujuan dari PSII yaitu dapat maju ke arah Islam yang modern, dengan dikeluarkannya konsep hijrah atau program aksi hijrah.

Pada saat PSII mulai berkembang, perpecahan dalam tubuh PSII mulai terlihat. Perbedaan dalam mengambil sikap terhadap Belanda menjadi permulaan perpecahan. Sebagian anggota PSII ada yang memilih bersikap kooperatif dan sisanya bersikap non-kooperatif. Hal ini membuat Kartosuwiryo mundur dari PSII dan membentuk Komite Pembela Kebenaran PSII (KPK-PSII), untuk menyelamatkan dasar tujuan awal PSII. Pergerakan komite yang dibentuk Kartosuwiryo ini mendapatkan bantuan dari K. H. Yusuf Taudjiri. Ketika diadakan sidang pertamanya, KPK-PSII dapat dukungan dari enam cabang PSII di Jawa Barat, seperti Cibadak,

Cirebon, Malangbong, Pasanggrahan, dan Wanaraja.¹¹ KPK-PSII yang masih memegang teguh konsep hijrah, akhirnya mendirikan lembaga Institut Suffah di Malangbong, Garut. Tujuan dari berdirinya lembaga ini adalah memberikan pendidikan formal ke-Islaman yang modern.

Pada saat Belanda melakukan Agresi Militer yang pertama di Jawa Barat, mereka melakukan serbuan-serbuan kilat terhadap markas-markas Brigade Divisi Siliwangi. Serbuan kilat tersebut dapat menembus dan merebut markas-markas Brigade Divisi Siliwangi. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan militer Belanda lebih unggul dalam jumlah pasukan dan persenjataan. Divisi Siliwangi yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan di Jawa Barat tidak menyerah dan terus bertempur melawan Belanda. Peristiwa ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat, di wilayah-wilayah kekuasaan Indonesia yang lain terjadi hal yang serupa dan banyak memakan korban dari pihak masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pada 27 Agustus 1947 PBB memutuskan menengahi dan menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda dengan membentuk Komisi Jasa Baik yang disebut sebagai Komisi Tiga Negara (KTN).

KTN yang bertugas untuk menyelesaikan konflik antara Belanda-Indonesia berhasil membujuk kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata dan melakukan perundingan damai yang dilaksanakan pada 17 Januari di kapal perang milik Amerika Serikat *US Renville*. Belanda yang menyetujui diadakannya perundingan, menuntut beberapa hal yang harus dipatuhi oleh pemerintah Indonesia.¹²

Setelah kesepakatan perjanjian *Renville* selesai, telah disepakati bahwa wilayah Indonesia hanya meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Sementara Jawa Barat masuk ke dalam daerah kependudukan Belanda. Hasil

¹¹Suwelo Hadiwijoyo, *Kahar Muzakkar dan Kartosuwiryo: Pahlawan atau Pemberontak?!*, (Yogyakarta: Palapa, 2013), hlm. 133.

¹²*Ibid.*, hlm. 67.

perjanjian tersebut membuat Kartosuwiryo kecewa, karena Jawa Barat mengalami situasi kekosongan pemerintahan dan keamanan (*vacuum government*). Divisi Siliwangi yang dipaksa meninggalkan Jawa Barat sebagai wilayah pendudukan Belanda tanpa perlawanan, dianggap oleh Kartosuwiryo sebagai kemunduran dalam mempertahankan kemerdekaan dan memberikan hak perlindungan kepada rakyat. Selain itu, adanya program pemerintah tentang reorganisasi dalam tubuh militer, membuat laskar-laskar yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia kecewa.

Pergerakan DI/TII di Garut sangat erat dengan peran Kartosuwiryo yang kecewa terhadap pemerintah dan pergerakan hijrah Divisi Siliwangi. Garut yang masuk dalam wilayah Priangan Timur dijadikan basis wilayah utama berjalannya pemerintahan DI/TII. Ateng Djaelani yang merupakan mantan perwira dari pasukan PETA di Jawa Barat dipercaya untuk memberikan pelatihan-pelatihan militer kepada para anggota DI/TII di Institut Suffah.

Kegiatan-kegiatan DI/TII yang bersifat menunjukkan eksistensi biasanya melakukan penjarahan, sabotase rel kereta api dan pembakaran rumah-rumah warga. Hal ini membuat banyak korban dari pihak penduduk yang berjatuhan. Penduduk yang ketakutan mengungsi ke daerah kecamatan Garut Kota, hal ini karena daerah yang menjadi pusat kota merupakan titik aman dari serangan gerakan DI/TII dan merupakan tempat yang banyak dihuni oleh pasukan TNI. Garut Kota yang menjadi wilayah pengungsian penduduk, membuat jumlah penduduk di Garut Kota membludak.¹³

D. Operasi Penumpasan Gerakan DI/TII di Garut Tahun 1950-1962

Gerakan DI/TII yang meresahkan penduduk, membuat pemerintah tidak tinggal diam dan segera melakukan operasi penumpasan. Penumpasan DI/TII yang dilakukan Divisi Siliwangi di Garut, dilaksanakan oleh Batalyon 306 Divisi Siliwangi

¹³Anggapradja, *Sejarah Garut Dari Masa ke Masa*, (Garut: Pemerintah Daerah Tingkat II Garut, t.t), hlm. 25.

di bawah komando Mayor Alwin Nurdin. Berdirinya Batalyon 306 tidak lepas dari adanya peleburan Brigade IV/Guntur I dan II yang beroperasi di wilayah Priangan Timur dan Priangan Selatan yang dipimpin oleh Let. Kol. Daan Yahya pada tahun 1946.

Operasi penumpasan DI/TII yang dilakukan oleh Batalyon 306 Divisi Siliwangi pada tahun 1950-1958 belum membuahkan hasil positif. Hal ini dikarenakan TNI dalam operasi penumpasannya bersifat insidental dan pergerakannya merupakan sebagai respon dari adanya penyerangan yang dilakukan oleh DI/TII ke pos-pos tentara. Dengan model operasi seperti ini, pihak TNI tidak dapat menyaingi pergerakan gerilya yang dilakukan oleh DI/TII.

Pada tahun 1959, TNI mulai menerapkan R.P 2. 1. dan P4K di daerah Garut. R.P. 2. 1. yang membatasi gerak lawan sehingga musuh terdorong ke dalam wilayah tertentu yang sudah dikuasai oleh pasukan Batalyon 306 di bawah komando Dan-Yon Alwin Nurdin dan mulai menghasilkan hasil positif di setiap daerah Garut.¹⁴ Operasi penumpasan yang sebelumnya masih bersifat konvensional dan pasif serta tidak dapat mengimbangi kekuatan gerilya DI/TII, perlahan-lahan ada perkembangan setelah diterapkannya R.P. 2. 1., P4K dan bantuan perlawanan dari rakyat.¹⁵

Operasi ini berhasil memukul mundur dan membuat pasukan DI/TII kewalahan. Daerah seperti Nanjungjaya menjadi bukti berhasilnya operasi ini. Pasukan gerilya DI/TII tidak dapat bergerak bebas dalam melaksanakan aktifitasnya, sehingga di daerah Nanjungjaya banyak anggota DI/TII yang terbunuh setelah baku tembak serta terkepung oleh pasukan TNI dan barisan perlawanan rakyat.

Sebagai tindak lanjut dari operasi penumpasan gerakan DI/TII di Garut, Batalyon 306 Divisi Siliwangi dibantu oleh pihak kepolisian dengan mengerahkan pasukannya, termasuk satuan Mobrig. Dari satuan ini muncul Kompi 5994 Ranger

¹⁴Ade Firmansyah, *SM. Kartosuwiryo: Biografi Singkat 1907-1962*, (Yogyakarta: Garasi, 2011), hlm. 81.

¹⁵Disjarah TNI AD, *op.cit.*, hlm. 129.

Mobrig yang bertugas menyisir perkampungan di daerah Ciawi dan Garut yang dipimpin oleh AKP K.E. Loemy.¹⁶

Pada tanggal 4 Juni 1962, kabar baik datang untuk pasukan TNI dan bangsa Indonesia. Pemimpin gerakan DI/TII yaitu Kartosuwiryo ditangkap oleh kesatuan kompi C Batalyon 328 Kujang II Siliwangi yang dipimpin oleh Letnan Dua Suhandi di daerah Gunung Geber, Majalaya. Hal ini disambut bahagia oleh Pangdam VI Siliwangi yang pada saat itu dijabat oleh Kol. Inf. Ibrahim Adjie. Karena wilayah yang menjadi pusat komando DI/TII seperti Malangbong, Gunung Guntur dengan segera dapat dikuasai oleh pasukan TNI.

Operasi-operasi penumpasan yang dilakukan oleh Batalyon 306 Divisi Siliwangi memberikan dampak-dampak tersendiri bagi penduduk sekitar. Tertangkapnya Kartosuwiryo membuat banyak anggota DI/TII yang menyerah tanpa syarat dan diberikan ampunan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini merujuk pada amanat Kartosuwiryo kepada anaknya Muhmammad Darda untuk segera menyuruh segala kegiatan DI/TII berakhir. Pasca operasi penumpasan Bratayudha, Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati oleh ketua sidang Mahkamah Angkatan Darat pada 16 Agustus 1962. Kartosuwiryo dianggap bersalah karena telah melakukan tindakan-tindakan merusak kedaulatan, pemberontakan terhadap kekuasaan yang sah di Indonesia, serta berusaha untuk melenyapkan pimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

E. Kesimpulan

Berdirinya DI/TII di Garut tidak lepas dari peran Kartosuwiryo ketika masih aktif berada di PSII dengan mendirikan Institut Suffah sebagai sarana pendidikan yang mengedepankan pemahaman Islam didalamnya. Adanya Institut Suffah turut

¹⁶Atim Supomo, dkk, *Brimob: Dulu, Kini dan Esok*, (Yogyakarta: Amazing, 2015), hlm, 168-169.

¹⁷Pinardi, *Sekarmadji Marijan Kartosuwiryo*, (Jakarta: Aryaguna, 1964), hlm. 16.

menarik perhatian masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo. Selain itu, pergerakan dari Divisi Siliwagi yang melakukan hijrah meninggalkan Jawa Barat turut menjadi landasan Kartosuwiryo memproklamasikan kemerdekaan DI/TII. Adanya kesamaan pemahaman dan ikatan keagamaan dengan penduduk, gerakan ini mudah berkembang dan diterima baik oleh masyarakat Garut.

Gerakan DI/TII yang diterima oleh masyarakat, berkembang dengan pesat. Hal ini terlihat dengan banyaknya masyarakat yang ikut mendaftar menjadi anggota DI/TII secara sukarela. Selain itu, adanya kesamaan pemahaman dalam bidang keagamaan membuat banyak orang membantu pergerakan DI/TII di Garut. Seiring berjalannya waktu, masyarakat menilai bahwa gerakan DI/TII tidak pantas untuk didukung oleh masyarakat karena pergerakannya mulai menyimpang dan meresahkan. Pasukan TNI tidak tinggal diam dan dengan segera melaksanakan operasi penumpasan. Operasi penumpasan DI/TII di Garut dilaksanakan oleh Batalyon 306 Divisi Siliwangi di bawah pimpinan Mayor Alwin Nurdin. Pelaksanaan operasi penumpasan yang dilakukan turut menyertakan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah lereng-lereng pegunungan Garut. Operasi penumpasan yang dilakukan berasama rakyat membuahkan hasil positif, banyak anggota DI/TII pergerakannya terkunci. Hal ini membuat banyak anggota DI/TII menyerah kepada TNI, terutama pada saat Kartosuwiryo sudah ditangkap dan ditahan oleh pemerintah.

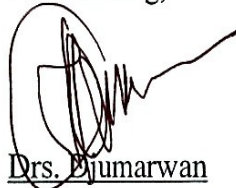
DAFTAR PUSTAKA

- Aan Ratmanto, *Pasukan Siliwangi: Loyalitas, Patriotisme dan Heroisme*, (Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2012).
- Ade Firmansyah, *SM. Kartosuwiryo: Biografi Singkat 1907-1962*, Yogyakarta: Garasi, 2011.
- Alwin Nurdin, *Riset Tentang Batalyon Dalam Operasi Anti-Gerilya Divisi Siliwangi/Territorium-III Jawa Barat*, (Bandung: Disjarah TNI AD, 1999).

- Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosuwiryo (Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/DI-TII semasa Orde Lama dan Orde Baru*, Jakarta: Darul Falah, 1999.
- Anggapradja, *Sejarah Garut Dari Masa ke Masa*, Garut: Pemerintah Daerah Tingkat II Garut, t.t.
- Atim Supomo, dkk, *Brimob: Dulu, Kini dan Esok*, Yogyakarta: Amazing, 2015.
- Bayu Surianingrat, *Pustaka Kabupaten i Bhumi Limbangan Dong Garut*, t.tk: t.p, 1985.
- Dadang Kahmad, *Agama Islam Dalam Perkembangan Budaya Sunda*, Bandung: Pusat Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2009.
- Disjarah TNI AD, *Penumpasan DI/TII S.M Kartosuwiryo di Jawa Barat*, Bandung: Disjarah TNI AD, 1985.
- Kunto Sofianto, *Garoet Kota Intan*, Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2001.
- M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia*, a.b, Dharmono Hardjowidjono, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.
- Nijhoff, S-Gravenhage Martinus, *Encyclopedie van Nederlandsche-Indie, Tweede Druk Eerste Deel*, Leiden: S-Gravenhage Martinus Nijhoff, 1917.
- Pinardi, *Sekarmadji Marijan Kartosuwiryo*, Jakarta: Aryaguna, 1964.
- Sandhaussen, Ulf, *Road To Power: Indonesian Military Politics 1945-1967*, Oxford: Oxford University Press 1982, a.b Hasan Besari, *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Suwelo Hadiwijoyo, *Kahar Muzakkar dan Kartosuwiryo: Pahlawan atau Pemberontak?!*, Yogyakarta: Palapa, 2013.

Yogyakarta, September 2017

Pembimbing,



Drs. Djumarwan
NIP. 19560101 198502 1 001

Reviewer,



Dr. Miftahuddin, M. Hum
NIP. 19740302 200312 1 006